

NASIONALISME EKONOMI INDONESIA DALAM ERA KOMPETISI GLOBAL

Syafaruddin Alwi

Abstract

However, what we call corruption, collusion and nepotism (KKN) is a disastrous mixture to the development. Indonesia has proved it. Many people agree that the crisis has been faced by the Indonesian nowadays was caused by the corruption, collusion and nepotism (KKN) practiced by the New Order. As KKN is proved as an obstacle of the Indonesian development, KKN would also be an obstacle factor for Indonesia in entering globalization and trade liberalization.

This article extends that we need a new paradigm to run the development ahead. In this context, the economic nationalism approach is a new alternative to develop. This article extends questions such as how and in what way this nation that is known having the Pancasila as its nationalism could overcome various problems possibly faced in the future. It focuses on how economic globalization would affect local economic actors' nationalism. It will be discussed with regard to human resource empowerment as the key element in succeeding economic development.

Tulisan ini akan membahas beberapa pertanyaan di seputar judul di atas yaitu, melalui apa, dalam bentuk apa dan bagaimana mengatasi tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia yang dikenal memiliki Pancasila sebagai jati diri nasionalisme Indonesia. Fokus pembahasannya adalah bagaimana globalisasi ekonomi akan mempengaruhi nasionalisme pelaku ekonomi dalam negeri, yang potensial menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bernegara, yang selama ini telah dipertahankan sebagai negara kesatuan berdasarkan paham kebangsaan atau nasionalisme Indonesia. Pembahasan dikaitkan pula dengan masalah pemberdayaan SDM sebagai elemen kunci keberhasilan pembangunan ekonomi.

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Krisis ekonomi sekarang ini dalam debat publik seringkali difahami sebagai akibat dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Praktek monopoli

dan oligopoli perekonomian, membuat terkonsentrasinya perekonomian pada kekuatan kapitalis yang bersifat *crony capitalism* yang disebabkan oleh KKN tadi. Hal ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan politik yang ditunjukkan oleh arogansi penguasa berhadapan dengan lemahnya kekuatan legislatif. Di lain pihak, praktek manajerial para pelaku ekonomi kuat, dengan dukungan fasilitas penguasa, membuat ekonomi rakyat tidak berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi konglomerat. Akibatnya perekonomian Indonesia rentan terhadap krisis karena sistem perekonomian dikembangkan atas dasar *manajemen clientilistic* dan kepemimpinan *otoritarian*, yang tidak berpihak pada optimalisasi kekuatan ekonomi rakyat. Keadaan yang di rasakan sekarang ini adalah, kesemrawutan manajemen pemerintah dan kesewenangan manajemen konglomerat dalam pengembangan bisnis (hutang swasta, penguasaan tanah.

monopoli perbankan) dengan sistem kontrol politik, sosial mau pun ekonomi (sistem kontrol devisa, kontrol hutang luar negeri dsb) yang lemah. Masalah ini telah menimbulkan kepailitan berbagai sektor ekonomi (riil dan moneter) yang pada akhirnya telah menimbulkan kemiskinan bagi rakyat.

Pada tahun awal 1997, jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya sekitar 17% atau 22,5 juta jiwa (data BPS). Tetapi pada saat ini (1998) jumlah penduduk miskin telah mencapai 40% atau 79,4 juta jiwa. Di perkotaan jumlah penduduk miskin meningkat drastis dari 15,3 juta jiwa (1996), menjadi 56,8 juta. Tidak mengherankan dengan kondisi seperti ini penjarahan atas kekayaan suatu usaha seperti penjarahan oleh lebih kurang lima ribu orang atas tambak-tambak udang dsb, telah terjadi. Selain itu, terdapat fenomena dimana para Kades (Kepala Desa) dan perangkat desa lainnya di berbagai tempat dijemu dan ditelanjangi oleh rakyatnya sendiri. Unjuk rasa karyawan berbagai perusahaan yang menuntut hak-hak mereka dan sejumlah tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Semua ini bisa dibaca sebagai derivasi dari kegagalan penerapan kepemimpinan politik, birokrasi atau bisnis terhadap masyarakat yang menjadi bagian dari tanggung jawab suatu organisasi baik pada skala mikro maupun makro.

Tuntutan yang demikian marak terhadap posisi penguasa, baik pada tingkat kepemimpinan nasional, propinsi, kabupaten dan bahkan sampai pada tingkat yang paling bawah yaitu desa, menunjukkan bahwa rakyat sudah tidak lagi melihat adanya sifat *imperatif* tindakan moral dalam kepemimpinan para penguasa di negeri ini terhadap kebenaran dan kepentingan rakyat. Sifat *imperatif* ini seharusnya mencerminkan perilaku para pemimpin yang bertindak secara moral, yang harus berperilaku dengan cara yang ditetapkan, sehingga mereka diharuskan untuk terikat oleh

kewajiban. Dengan demikian, tindakan pemimpin dalam pengambilan keputusan dilandasi oleh prinsip-prinsip kebenaran.

Dalam kaitan dengan krisis ekonomi saat ini para pengambil keputusan di bidang ekonomi, hendaknya dilandasi oleh tindakan moral yang dalam pengertian Etzioni (1992) harus berpihak kepada kebenaran. Ketidakbenaran dalam pengambilan kebijakan-kebijakan ekonomi selama ini telah melahirkan sifat perekonomian yang bersandar pada proses kolusi, nepotisme dan korupsi yang tidak menjamin keadilan ekonomi. Proses ini akhirnya menghambat distribusi barang dan sumber-sumber daya langka, terutama peredaran modal dalam masyarakat. Ekonomi tidak hanya menyangkut masalah mekanisme pasar. Ekonomi menyangkut distribusi dan distribusi merupakan masalah politik. Ketimpangan kekuatan-kekuatan politik di negara kita selama orde baru, terbukti telah melahirkan krisis perekonomian yang berkepanjangan.

Solusi terhadap masalah ini adalah reformasi politik yang berlandaskan tindakan moral yang bersifat *imperatif*. Pada awalnya Adam Smith mengembangkan konsep-konsep ekonomi bertumpu pada filsafat moral yang berlandaskan pada asumsi kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan sumber-sumber daya ekonomi relatif terbatas. Asumsi ini melahirkan konsep ekonomi yang meletakkan mekanisme pasar sebagai andalan. Mekanisme pasar absolut adalah liberal dimana dalam masyarakat yang bersifat dualistis hanya akan mendorong kapitalis menjadi monopolis yang menciptakan wawasan manajerial bisnis yang serakah. Oleh sebab itu, paradigma ekonomi baru harus lahir untuk menghindarkan masyarakat dari sifat-sifat perekonomian monopolis yang merugikan kepentingan ekonomi masyarakat bawah. Paradigma ini harus memasukkan dimensi moral dalam penerapan teori-teori ekonomi dan manajemen pembangunan, selain dimensi politik guna menegaskan terciptanya

keadilan dalam penggunaan sumber-sumber daya ekonomi.

Beberapa peristiwa yang terjadi secara tragis di era reformasi ini dianggap bisa mengancam disintegrasi bangsa, seperti maraknya tuntutan sebagian masyarakat di Timor Timur, Irian Jaya, Aceh dan Riau untuk melepaskan diri dari negara kesatuan RI, atau yang terjadi di Jakarta (peristiwa Ketapang) dan Ambon. Terjadinya pengrusakan tempat-tempat ibadah yang disulut oleh isu sara (yang potensial memecah belah umat beragama) akhirnya akan menimbulkan isu baru, dimana propinsi yang mayoritas umatnya beragama non-Islam akan menuntut memisahkan diri dari negara kesatuan RI. Disamping itu pengaruh ekonomi dan tekanan politik internasional sangat potensial menyulut ketegangan politik dalam negeri, sehingga menciptakan instabilitas. Tekanan IMF agar Pemerintah menghapuskan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok beberapa waktu yang lalu hampir mendorong terjadinya kerusuhan yang fatal bagi kelangsungan stabilitas ekonomi dan politik. Pengrusakan, pembunuhan, penjarahan dan pembakaran di berbagai wilayah dirasakan semakin sukar dikendalikan. Peristiwa ini seolah-olah tidak lagi mengindahkan kepentingan nasional dan perilaku kehidupan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang selama ini dianggap sebagai jati diri nasionalisme Indonesia.

Nasionalisme Indonesia adalah paham kebangsaan yang mengajarkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kebhinekaan agama, budaya dan suku sebagai kekuatan untuk membentuk dan mempertahankan eksistensi kehidupan bernegara. Dalam kaitan dengan kehidupan ekonomi, nasionalisme bangsa yang salah satu wujudnya mendorong semangat melawan penjajah, akan mendorong tumbuhnya nasionalisme ekonomi.

Nasionalisme ekonomi merupakan semangat membangun perekonomian dengan mengutamakan kepentingan nasional, sehingga selalu menjiwai setiap kebijakan ekonomi.

Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang sempit, yang menimbulkan *chauvinism* karena ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya, negara membuka diri terhadap hubungan internasional baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Apa lagi, dalam era globalisasi sekarang ini, dimana batas negara seolah-olah telah hilang sebagai akibat arus informasi yang sangat cepat, mobilitas penduduk dunia tinggi, kepedulian internasional atas kehidupan masyarakat suatu negara semakin menonjol. Oleh karenanya, Kenichi Obmae menyebutnya *border less world*.

Globalisasi kehidupan antar negara dalam berbagai aspek, khususnya aspek ekonomi, memasuki melinium ketiga ini, meletakkan eksistensi suatu negara menjadi bagian dari tata ekonomi dunia. Konsekuensinya, penetrasi ekonomi internasional terhadap kehidupan ekonomi dalam negeri akan semakin deras, sehingga menimbulkan berbagai bentuk tantangan akan peluang ekonomi. Indonesia sangat berkepentingan terhadap pasar internasional dan berpeluang untuk merebut pasar internasional itu. Tetapi saat ini Indonesia secara ekonomi semakin tergantung pada bantuan luar negeri, khususnya IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya. Investor asing sangat diharapkan mau menanamkan dananya di Indonesia.

Ketergantungan ini sangat potensial bagi munculnya eksese-eksese negatif kehidupan ekonomi dalam negeri yang mempengaruhi perilaku pelaku-pelaku ekonomi dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, sehingga bisa menggoyahkan sendi-sendi perekonomian nasional yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebagai

contoh, penandatanganan kesepakatan dengan IMF yang berkaitan dengan pinjaman oleh Presiden Soeharto waktu sebelum lengser, dianggap banyak kalangan sebagai telah merendahkan nasionalisme yang kita junjung tinggi, karena telah tunduk pada ketentuan-ketentuan lembaga asing. Dalam perspektif *Push Loan Theory*, negara penerima bantuan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan negara atau lembaga donor.

KAPITALISME INTERNASIONAL

Ada dugaan bahwa penetrasi kekuatan global ke dalam perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia dilakukan melalui jaringan kapitalisme internasional. Jeffrey Sach dari Harvard University (1996) mengemukakan tentang reformasi ekonomi dan proses integrasi global dimana dalam sejarah ekonomi dunia sistem kapitalisme telah muncul dua kali, yaitu pada akhir abad ke 19 dan akhir abad ke 20. Sistem kapitalisme global pertama mencapai puncaknya sekitar tahun 1910, tetapi berantakan karena perang dunia ke I dan perang dunia ke II. Kebangkitan yang kedua adalah pada tahun 1980-an dengan dibangunnya kembali ekonomi pasar global yang pernah terjadi 100 tahun yang lampau. Menyimak pendapat ini, jika benar globalisasi sekarang merupakan derivasi dari pemikiran kapitalisme, maka kekuatan modal internasional akan menyebar ke seluruh perekonomian negara berkembang. Penyebaran ini bukan lagi dalam bentuk ekspansi imperialisme, melainkan dalam bentuk penguasaan pasar dan sumber daya ekonomi. Sistem kapitalisme internasional telah menunjukkan bentuknya dengan mengikutsertakan semua kekuatan dunia menuju pengaturan perdagangan terbuka, relokasi industri dan harmonisasi lembaga-lembaga ekonomi.

Strategi ini tidak lepas dari kepentingan negara maju yang menjadikan negara berkembang sebagai pasar bagi produk

mereka. Negara-negara berkembang, menurut Sach, cenderung melakukan reformasi ekonomi dengan tujuan mengintegrasikan ekonomi nasional mereka ke dalam ekonomi dunia. Tindakan ini wajar dilakukan oleh negara-negara berkembang guna memanfaatkan peluang pasar pasca kebijakan proteksionis yang telah menciptakan *trade barriers* bagi negara berkembang dalam hubungan bilateral maupun multilateral.

Isu perekonomian global telah bergulir sejak tahun 1947, yaitu ketika dibentuknya perjanjian umum perdagangan internasional mengenai tarif dan perdagangan (GATT). Terbentuknya GATT dimulai dengan 23 anggota dan sekarang telah mencapai 96 negara. Dalam perkembangannya kemudian, perekonomian yang mulai mengglobal, kembali pada proses regionalisasi yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok kerjasama antar negara yang terbatas. Contoh regionalisasi yaitu munculnya kerjasama berdasarkan lingkup wilayah tertentu seperti: Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) tahun 1957, LAFTA (1960) untuk Amerika Latin, NAFTA, AFTA, APEC, dan sebagainya.

Pada mulanya, kerjasama antar negara yang terbatas itu ditujukan untuk mengatasi hambatan perdagangan diantara negara-negara anggota. Dalam perkembangannya kemudian ditujukan pula untuk memperkuat posisi kepentingan kelompok dalam persaingan internasional. Terbentuknya GATT yang kemudian menjadi *World Trade Organization* (WTO) menimbulkan efek positif, karena perdagangan internasional menjadi bebas dari hambatan tarif dan non-tarif; sehingga mendorong peningkatan ekspor negara-negara anggota. Tantangan bukan tidak ada. Dalam APEC negara anggota tidak boleh melakukan diskriminasi kebijakan. Investor asing diberlakukan sama dengan investor domestik. Beberapa studi menunjukkan bahwa masuknya modal asing dengan kekuatan lebih dari 50% pemilikan saham akan men-

ciptakan tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga potensial menjadi monopoli. Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk melalui *Multi National Enterprises* (MNEs) menurut Lall (Casson dan Pearce, 1992), akan mempertinggi konsentrasi bisnis. Pandangan ini diperkuat dengan empat alasan:

- (1). Kekuatan MNEs untuk bersaing akan memaksa perusahaan lokal keluar dari persaingan.
- (2). MNEs dapat membeli perusahaan pesaing lokalnya. Hasil studi di Brasil dan Meksiko yang dilakukan oleh Newfarmer dan Mueller menunjukkan terjadinya keadaan ini, yaitu pencaplokan dan penggabungan industri barang-barang listrik antara tahun 1960-1974.
- (3). Kehadiran perusahaan asing secara tidak langsung mengarah ke konsentrasi yang merangsang terjadinya penggabungan defensif perusahaan lokal. Dalam hal ini, Lall menampilkan bukti empiris hubungan antara kehadiran MNEs dengan peningkatan konsentrasi pasar dengan menggunakan data 46 perusahaan di Malaysia.
- (4). Melalui cara ini MNEs dalam jangka panjang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara.

Dengan demikian, berdasarkan keempat alasan itu, kehadiran MNEs di suatu negara dilihat dari perspektif ekonomi-politik mempunyai pengaruh sebagai *predatory conduct* (pemangsa).

Bagi Indonesia, pengalaman Malaysia mungkin juga akan berlaku. Perekonomian Indonesia adalah perekonomian yang terbuka. Artinya, perekonomiannya tidak lepas kaitannya dengan sistem perekonomian internasional. Kondisi ini membuka peluang intervensi sistem kapitalisme internasional dalam berbagai bentuk ke dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Intervensi sistem kapitalis ini terjadi melalui berbagai jalur, seperti masuknya modal asing baik

dalam bentuk pinjaman luar negeri, investasi asing langsung (*foreign direct investment /FDI*) maupun investasi asing tidak langsung (*foreign indirect investment/FII*). Masuknya (MNEs) ke dalam jaringan perdagangan dalam negeri, dalam perspektif ekonomi politik, dikhawatirkan akan menimbulkan praktek perdagangan yang tidak adil dan monopolistis. Secara teoritik, MNEs yang beroperasi di suatu negara dianggap sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan induk di negara asal modal (*Home Country*).

TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berdasarkan uraian di muka tentang jaringan kapitalisme internasional, dapat dilihat benang merah tantangan nasionalisme dan ideologi Pancasila yang datang dari proses globalisasi ekonomi. Nasionalisme bangsa yang tumbuh berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara akan menciptakan sikap dan perbuatan rakyat dan pembuat kebijakan yang akan menolak dominasi kekuatan asing dalam kehidupan politik, sosial budaya dan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi dunia sekarang ini, tantangan yang akan mengancam Pancasila sebagai jati diri nasionalisme bangsa Indonesia adalah:

- (1). Kebutuhan akan bantuan luar negeri yang mendesak sebagai cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan akan semakin meletakkan posisi Indonesia kepada ketergantungan internasional. Ketergantungan ini menyebabkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi akan dipengaruhi oleh kepentingan negara donor.
- (2). Penetrasi investasi asing dalam berbagai bentuk akan mendesak kehidupan di sektor bisnis domestik, yang akhirnya dalam jangka panjang akan melemahkan ketahanan ekonomi nasional. Kasus Freeport sudah jelas telah merendahkan nasionalisme bangsa,

karena kepemilikan saham yang tidak adil bagi negara kita yang notabene adalah pemilik. Penyebabnya, *bar-gaining power* yang terlalu kuat yang dimiliki investor asing dan rendahnya rasa nasionalisme kita karena menyerah pada kehendak investor asing.

- (3). Dalam era globalisasi ini, seharusnya Indonesia tidak berupaya mengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam ekonomi internasional, melainkan berupaya menyatukan ekonomi nasional berdasarkan nasionalisme ekonomi. Tetapi dengan ketahanan ekonomi yang lemah, penguasaan saham-saham oleh investasi asing atas perusahaan-perusahaan nasional akan mengurangi semangat nasionalisme pelaku-pelaku ekonomi. Akhirnya, hal ini akan melemahkan ketahanan nasional.
- (4). Dalam kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan sekarang ini, Indonesia berada pada posisi yang sangat lemah sehingga kekuatan-kekuatan ekonomi domestik tidak mampu membentuk ketahanan ekonomi guna mengatasi guncangan-guncangan ekonomi dunia.

Untuk mengatasi tantangan ini, patut di simak pandangan Mubyarto dalam buku *Ekonomi Pancasila* (1987) sebagai berikut: *"Sebaiknya perasaan nasionalisme yang kuat harus menjivai semua pelaku ekonomi. Apakah itu businessman, koperasi, perusahaan negara termasuk pejabat pemerintah yang mengadakan kebijaksanaan ini, harus mempunyai perasaan nasionalisme yang kuat. Konsep nasionalisme ini mempunyai kaitan erat dengan ketahanan nasional yang sudah lama dikembangkan"*

Pada bagian lain Mubyarto lebih lanjut mengemukakan; *"Dalam menuju perekonomian yang tangguh, kita harus lebih mementingkan perkembangan kekuatan-kekuatan produktif dan bukannya memproduksi langsung ba-*

rang-barang atau nilai-nilai yang laku di-jual ke pasar".

Beranjak dari pandangan itu, Indonesia harus kembali mengkaji kekuatan-kekuatan produktif tersebut, sehingga terhindar dari kesalahan masa lalu. Pada masa lalu Indonesia cenderung memproduksi barang yang laku diekspor, tanpa memperkuat basis produksi bahan baku dalam negeri sebagai kekuatan produktif ekonomi rakyat. Akibatnya, ketika krisis ekonomi menghantam Asia, Indonesia menderita dampak paling parah dibandingkan dengan negara-negara anggota lainnya. Hal ini disebabkan melonjaknya nilai tukar dolar dan ketergantungan bahan baku dari luar negeri. Strategi Promosi Ekspor (*outward looking*) yang menggantikan Strategi Substitusi Impor (*inward looking*) yang dijalankan selama ini telah meninggalkan kekuatan-kekuatan produktif ekonomi rakyat, yang ternyata lebih tangguh menahan badai krisis ekonomi.

Oleh sebab itu, jiwa nasionalisme yang merupakan jati diri Pancasila sebagai ideologi harus ditumbuhkan kembali melalui penerapan sistem ekonomi Pancasila yang sudah sering dilecehkan sebagai pengganti sistem kapitalisme semu, yang secara malumu telah dianut Indonesia. Upaya Mubyarto memasukkan rumusan ekonomi rakyat dalam GBHN 1993, merupakan pewujudan dari jiwa nasionalisme yang patut dihargai.

Emil Salim (1987) mengemukakan bahwa dalam sistem ekonomi Pancasila perlu dibuka kesempatan yang luas bagi kelompok masyarakat untuk menggunakan (*accessibility*) sumber daya alam yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pintu masuk ini harus terbuka secara adil bagi semua (*equal opportunity*), terlepas dari perbedaan suku, agama, ras ataupun daerah. Tindakan ini akan memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sistem ekonomi ini hubungan antar lembaga-lembaga ekonomi

tidak didasarkan pada kekuatan dominasi modal sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis, sehingga masyarakat sebagai suatu kesatuan memegang peranan sentral dalam perekonomian.

Guna memberikan dukungan kepada konsep ekonomi Pancasila ini, masalah pemberdayaan SDM Indonesia menjadi sangat penting dan relevan sebagai pilar perekonomian rakyat.

Secara makro, dilihat dari lingkungan eksternal, Indonesia dalam masa krisis ini menghadapi berbagai pengaruh internasional, baik ekonomi maupun politik yang mengakibatkan semakin tergantungnya pada kebijakan pemerintah negara lain atau institusi internasional. Di dalam negeri, ekonomi Indonesia sangat potensial menghadapi perubahan dari resesi menjadi depresi. Jika ini terjadi, menurut Soemitro, diperlukan waktu paling tidak 7 tahun untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Implikasinya pada SDM yaitu peluang kerja menjadi sangat sempit dan pengembangan SDM menjadi semakin terbatas. Secara mikro, unit-unit bisnis di sektor industri relatif lumpuh karena ketergantungan secara makro tersebut, sehingga untuk membangkitkannya kembali sangat terbuka peluang bagi penguasaan modal asing atas perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Hal ini berarti akan terjadi perubahan dalam gaya kepemimpinan dan manajemen perusahaan.

Penerapan AFTA agar mampu bersaing di pasar ini, diperlukan kekuatan organisasi bisnis pada semua tingkatan dengan dukungan SDM yang profesional. SDM yang profesional memiliki ciri antara lain:

- (1). Standar keahlian yang spesifik
- (2). Berorientasi pada prestasi kerja, memiliki tingkat kemampuan (*conceptual, human dan technical skill*) yang tinggi
- (3). *Sense of professionalism* yang tinggi.

Sementara itu, krisis yang berkepanjangan telah melumpuhkan berbagai usaha di sektor riil maupun moneter, semakin banyak terjadi PHK sehingga anak-anak putus sekolah meningkat. Implikasi jangka panjangnya adalah terhambatnya pembentukan SDM yang profesional bagi usia angkatan kerja.

POLA PENGEMBANGAN SDM

Beranjak dari uraian di muka, maka dimensi moral ini harus pula diintegrasikan ke dalam pola pengembangan SDM pendukung manajemen pembangunan, terutama pada skala mikro (manajemen bisnis). Skala mikro ini menyangkut tiga lingkup *skill*, yaitu *conceptual skill, human skill* dan *technical skill*. Dalam beberapa segi pengembangan SDM Indonesia harus belajar dari AS mengenai investasi bagi pendidikan seumur hidup. Data statistik menunjukkan bahwa investasi AS untuk program pendidikan seumur hidup mencapai US \$ 665 miliar. Dana ini lebih besar dari pada dana yang dikeluarkan bagi kepentingan pertahanan AS. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi perkembangan ekonomi negara itu yang mengalami kekurangan tenaga trampil yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sebagaimana dialami oleh Indonesia sebelum terjadi krisis.

Dalam 20 tahun mendatang AS akan memunculkan sektor pendidikan sebagai salah satu sektor yang diunggulkan untuk mengisi kebutuhan dunia kerja. Mereka akan kembali mengembangkan metode pelatihan yang mampu membentuk beragam keterampilan dan pengetahuan para lulusan, mulai dari *technical skill* sampai kepada kemampuan membentuk dan mengelola kelompok kerja (*human and conceptual skill*). Di sini faktor kepemimpinan dan manajerial sangat menentukan.

Michel Milken, seorang pengusaha AS, dengan visi menyiapkan kebutuhan tenaga kerja abad 21 mengembangkan sebuah lembaga pendidikan yang disebutnya se

bagai *knowledge university* (KU). KU memiliki kurikulum yang dipersiapkan untuk tingkat balita sampai pada para pensiunan sebagai upaya pendidikan seumur hidup (*long life education*). Sistem pendidikan seperti ini memerlukan *konsistensi*, *kompetensi* dan *relevansi* yang kuat dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Tetapi sayangnya, dengan kecanggihan sistem dan teknologi pendidikan yang dimiliki, AS tidak bisa melepaskan diri dari citra pendidikan yang sangat kental dengan misi bisnis. Bagi Indonesia, masalah ini sering menimbulkan sensitivitas sosial yang destruktif. Di AS, pola pengembangan SDM seperti itu sangat mungkin karena adanya hubungan dan dukungan timbal balik antara dunia pendidikan dengan dunia perusahaan. Sementara itu, di Indonesia dunia pendidikan seolah-olah terpisah dengan dunia kerja. Akibatnya, tantangan dunia kerja tidak dapat dijawab oleh dunia pendidikan.

Kasus-kasus ketenagakerjaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pola perkembangan bisnis yang cenderung berorientasi absolut pada misi profit, sehingga *social* dan *security cost* tidak diperhitungkan dalam penarikan tenaga kerja. Sebagai contoh, kerusakan penduduk di sekitar perusahaan tambang di Timika cenderung disebabkan oleh sistem penarikan tenaga kerja siap pakai yang umumnya berasal dari luar wilayah Timika, sehingga persentase angkatan kerja yang berasal dari wilayah tersebut sangat kecil. Akibatnya, timbullah kesenjangan sosial ekonomi yang menyulut kerusakan. Biaya memadamkan kerusakan ini, dengan segala akibatnya, seringkali justru lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan bagi pelatihan tenaga kerja lokal.

Pengembangan SDM Indonesia, ditentukan paling tidak oleh dua kebutuhan pokok. *Pertama*, kebutuhan untuk menjawab *tantangan persaingan global* dunia kerja yang bercirikan *sense of professionalism* yang tinggi sebagai akibat ma-

suknya investasi asing langsung (FDI) di dalam negeri dan ekspansi bisnis Indonesia ke pasar luar negeri. *Kedua*, kebutuhan dalam negeri yang terarah pada peningkatan kualitas ketrampilan teknis tenaga kerja menengah, yang selama ini hampir sebagian besar kelompok ini tergolong *low quality employment*. Kebutuhan SDM yang berkualitas tinggi dalam menghadapi persaingan global sangat mutlak. Berdasarkan *World Competitiveness Report* (1996), Indonesia memiliki daya dukung persaingan internasional yang sangat lemah. Tahun 1994, dari 46 negara di Asia Pasifik yang diteliti, Indonesia menduduki ranking 44 dan tahun 1996, menduduki ranking ke-45. Ini berarti Indonesia belum siap menghadapi tantangan persaingan pasar global. Di lain pihak, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri (Arab Saudi, Malaysia, Hongkong dsb) kebanyakan baru berada pada *level* mengisi kebutuhan sektor rumah tangga, yang tingkat profesionalitasnya rendah. *Level* ini memiliki ciri utama tidak ada standardisasi kualitas yang dijamin oleh *sistem sertifikasi keahlian yang well educated*. Akibatnya, *bargaining power* untuk kompensasi bagi mereka di dunia kerja lemah.

Dilihat dari dimensi kepemimpinan dan manajerial, paradigma manajemen yang terbentuk pada skala global telah mengalami pergeseran:

- (1).dari paradigma individualisme ke paradigma *collective effort*
- (2).dari paradigma *autocratic leadership* ke paradigma *coaching* dan *enabling*
- (3).dari paradigma *differenciation* ke paradigma *cross functional work*
- (4).dari paradigma *profit* ke paradigma *customer satisfaction*
- (5).dari paradigma *productivity* ke paradigma *quality*.

Berkaca pada model pengembangan yang dilakukan oleh AS, pola pengembangan SDM Indonesia sebaiknya bertumpu pada

kerjasama dunia usaha dengan dunia pendidikan. Hal ini untuk membuat suatu *connecting door* antara kebutuhan SDM dengan sistem pendidikan nasional. Untuk itu, pengembangan ketrampilan dan keahlian SDM tingkat menengah, sekolah-sekolah kejuruan yang spesifik, lembaga-lembaga pelatihan dan program-program D1, D2 dan D3 yang spesifik sangat diperlukan. Pengembangan kurikulum SDM tingkat menengah dengan keahlian yang spesifik perlu diarahkan sesuai dengan perubahan paradigma yang telah disebutkan dimuka.

Disamping itu, perlu dikembangkan pula manajemen dan sistem pendidikan yang setara dengan kualitas manajemen dan sistem pendidikan di negara-negara maju, terutama AS. Hal ini dapat mengurangi intervensi lembaga pendidikan asing ke Indonesia. Permintaan mahasiswa Asia pada umumnya untuk belajar ke AS cukup tinggi. Masalah yang dihadapi adalah apa penyebab tingginya minat mahasiswa Asia, termasuk Indonesia, memasuki perguruan tinggi di AS dan negara-negara lain adalah faktor-faktor apa yang menjadi penyebab. Jawaban terhadap pertanyaan ini akan menjadi salah satu dasar bagi perubahan sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Dunia pendidikan internasional telah maju pesat dengan dukungan teknologi, sistem manajemen operasional yang solid dan dukungan sumber daya manusia yang *qualified*. Pendidikan internasional juga telah melakukan ekspansi ke seluruh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal itu sangat dimungkinkan karena beberapa alasan.

- (1). Sistem pendidikan yang umumnya dianut (seperti di AS, Australia dsb), memungkinkan manajemen pendidikan tinggi untuk melakukan "aktualisasi diri" sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi.
- (2). Kebijakan pendidikan tinggi tidak *centralized* kepada kebijakan pemerintah.

Akreditasi kualitas pendidikan tergantung pada penilaian masyarakat sebagai pengguna jasa lulusan pendidikan.

- (3). Kerjasama pendidikan dengan dunia bisnis terutama dalam penelitian, konsultasi, pelatihan dsb, telah menjadi kegiatan yang rutin sehingga sumber pembiayaan pendidikan sangat bervariasi.
- (4). Peluang investasi asing di bidang pendidikan di negara berkembang dan peluang menarik minat belajar mahasiswa asing belajar di negara-negara maju lebih besar karena *image* kualitas yang dianggap lebih baik.

Sementara itu, sistem pendidikan tinggi di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan klasik yaitu perdebatan-perdebatan mengenai:

- (1). Apakah output yang dihasilkan dari suatu pendidikan tinggi berorientasi pada kebutuhan pasar tenaga kerja (siapa pakai) atau output yang berorientasi pada keilmuan.
- (2). Apakah pengembangan sistem pendidikan tinggi dikelola sebagai manajemen bisnis industri jasa atau sebagai lembaga pendidikan yang bertumpu pada manajemen lembaga pendidikan.

Dua persoalan tersebut, terutama bagi perguruan tinggi swasta, tidak mudah mencari jawabannya, karena jelas lulusan perguruan tinggi di Indonesia umumnya tidak siap pakai. Untuk pertanyaan yang kedua, beberapa perguruan tinggi yang relatif baru berdiri, telah melakukan terobosan dengan mengelola lembaga pendidikan yang berorientasi pada manajemen bisnis dengan investasi yang sangat besar yang di biayai oleh konglomerasi.

Akibatnya, biaya pendidikan tinggi menjadi sangat mahal dan hanya bisa diikuti oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Disini, lembaga pendidikan dengan filosofi fasilitas dan sistem adalah kualitas telah menjadi industri jasa pendidikan. Di-

hadapkan pada kompetisi global, lembaga pendidikan seperti itu lebih mempunyai peluang untuk bersaing dengan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi asing. Masalahnya, filosofi organisasi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya perguruan tinggi swasta, tidak bisa lepas dari komitmen terhadap lingkungannya. Dalam hal ini disebut istilah bisnis *stakeholders* yaitu, mahasiswa, dosen, pemerintah, karyawan dan masyarakat pada umumnya. Mereka umumnya yang tidak mungkin lepas dari harapan biaya pendidikan yang murah tetapi berkualitas. Suatu harapan yang bersifat paradoks.

Bagi perguruan tinggi swasta yang sumber pembiayaan pendidikannya sebagian besar dari para orang tua mahasiswa, persoalan yang dihadapi adalah penyelenggaraan pendidikan yang kurang didukung oleh sistem, fasilitas, teknologi dan kualitas sumber daya manusia profesional dalam bidangnya.

Dalam masa krisis saat ini, ada anggapan bahwa dunia pendidikan di Asia akan

mengalami krisis kiriman dari Amerika maupun negara-negara lain, dimana banyak mahasiswa Asia dan Indonesia belajar. Untuk Amerika Serikat misalnya, sebelum krisis terdapat sekitar 260.000 mahasiswa dari Asia, termasuk Indonesia, Jepang, Taiwan, China, dan sebagainya yang belajar di berbagai perguruan tinggi. Enam belas persen dari jumlah itu mengambil jurusan bisnis. Beberapa sekolah yang banyak menarik minat belajar mahasiswa Asia dapat dilihat dari tabel 1.

Dalam 20 tahun mendatang Amerika Serikat akan memunculkan sektor pendidikan sebagai salah satu sektor yang diunggulkan untuk mengisi kebutuhan dunia kerja. Mereka akan kembali mengembangkan metode pelatihan yang mampu membentuk beragam keterampilan dan pengetahuan para lulusan mulai dari *technical skill* sampai kepada kemampuan membentuk dan mengelola kelompok kerja (*human dan conceptual skill*). Di sini faktor sistem pendidikan dan manajerial sangat menentukan. Suatu tantangan bagi sistem pendidikan di Indonesia.

Tabel 1
Jumlah Orang Asia yang Belajar
di Perguruan Tinggi di AS

Perguruan Tinggi	Peringkat Sekolah	% orang asing
Camegie Mejlou University	19	30
Washington University	24	27
University of Rochseter	15	25
Am. Grad. Sch of Int. Mgt	16	23
Case Western Reserve	17	20

Sumber: *Fortune*, dikutip dari *Warta Ekonomi* no 22, 1998, (diolah)

DAFTAR PUSTAKA

- Casson dan Robert D, (1992). *Multi National Corporation di LDCs*, Jakarta, LP3ES
- Kreshner D. Stephen, (1970). *International Regimes*, Tulisan O'Connors, Cornell UP
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta, LP3ES
- Salim, Emil, (1987). "Ekonomi Pancasila" dalam Sri Edy Swasono. (Ed), *Sistem Ekonomi dan Doktrin Ekonomi*, Jakarta, UI Press
- Sach Jeffrey, (1996), *Globalisasi Ekonomi*, makalah pada Panglaikim Memorial Lecturer, Jakarta
- World Bank, (1996). *Competitiveness Report*, New York
- Warta Ekonomi*, No 22, 1998.